

## KPK Periksa Mantan Ketua KPU .....

**Dari Halaman 1**

gan aja. Enggak ada (bawa bukti), catatan aja," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1). Selain itu KPK juga memeriksa Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Kepada awak media, Saffar mengaku akan diperiksa penyidik terkait data perlintasan buron Harun Masiku pada lima tahun lalu. "Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya. Terakhir, KPK juga memanggil kader sekaligus mantan Caleg asal PDIP Saeful Bahri seba-

gai saksi. Saeful akhirnya memenuhi panggilan setelah sebelumnya sempat mangkir dua kali. Hanya saja, Saeful memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media terkait materis pemeriksaan serta alasannya sempat mangkir. "Makasih ya, nanti ya," turnnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI

periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto juga dikenalkan pasal perintangannya penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. **(cnni/js)**

## Muhammadiyah Akan Polisikan .....

**Dari Halaman 1**

pengaduan ke Mabes," kata Gufroni, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (15/1). Gufroni berkata laporan akan dilayangkan setelah tenggat waktu somasi terlewati pada hari ini. Namun dia belum menyebut nama pihak yang akan dilaporkan. "Waktunya (untuk melaporkan) mungkin antara Kamis dan Jumat," ujar dia. Di sisi lain, Gufroni menyebut Jaringan Rakyat Pantura (JRP) sebuah perkumpulan

nelayan yang mengklaim memasang pagar itu juga belum menghubungi mereka. "Sampai saat ini tidak ada," ujar dia. Sebelumnya, LBHAP Muhammadiyah melayangkan somasi terbuka kepada pihak pemasangan pagar laut di pesisir utara Tangerang untuk segera mencabut pagar yang mereka pasang. Gufroni menyatakan pemagaran ini menyebabkan sejumlah dampak negatif seperti mengganggu aktivitas nelayan tradisional sekitar, hingga melanggar hak akses publik atas laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan

masyarakat secara bebas dan adil. Lalu, ia menilai pemagaran itu juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. "Berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mencabut dan membersihkan pagar bambu yang telah menghalangi akses laut bagi nelayan dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkannya somasi terbuka ini," kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (13/1). **(cnni/js)**

## Bukan Bagian PSN .....

**Dari Halaman 1**

perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK (Pantai Indah Kapuk 2) nya," ujar Air-lingga. Salah satu PSN yang berada di sekitar pagar laut misterius itu adalah Tropical Coastland. Lokasi PSN seluas 1.836 hektare itu berdampingan dengan proyek PIK2, Banten. Penetapan PSN Tropical Coastland tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN Tropical Coastland terbagi dalam lima

zona pembangunan. Pertama, zona pembangunan A seluas 14,3 hektar yang berisikan Taman Bhineka dan terdapat masjid agung, gereja, dan vihara. Kedua, zona pembangunan B berisi kebun binatang, danau, dan pantai. Ketiga, zona pembangunan C yang berfokus pada keberadaan mangrove dan proyek olahraga. Kawasan mangrove ini akan mengubah luas Mangrove yang semula hanya 91,97 hektar menjadi 515,79 hektar. Keempat, zona D berisi kawasan olahraga internasional yang menjadi daya tarik wisatawan internasional datang ke Indonesia. Terakhir, zona E sebagai tempat berdirinya

sarana olahraga, wisata eco-tourism dan resort cottage. Sementara, pagar laut misterius di pesisir Tangerang tidak mengantongi izin alias ilegal. Keberadaan pagar yang membentang jauh ke laut ini mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan memunculkan spekulasi adanya proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencakup wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan ada 502 orang pembudidaya di lokasi itu. **(cnni/js)**

## PKS Evaluasi Makan .....

**Dari Halaman 1**

terus dievaluasi secara berkala. Dia memberi sejumlah catatan mulai dari variasi menu, takaran gizi, hingga kualitas rasa makanan. "Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (15/1). Dia mengaku banyak menerima laporan sisa makanan karena siswa tak menghabiskannya. Menurut dia, hal itu perlu menjadi catatan. Ke depan, sekolah atau panitia bisa melakukan survei menu-menu yang tidak dan disukai siswa. "Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid,

sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian," katanya. Netty juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah menurutnya memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan baik. "Untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia," kata Netty. Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program

di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ganti dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal. "Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik," ucap Netty. Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang. Sementara dalam sepekan awal, MBG telah diterima sekitar 600 ribu orang. **(cnni/js)**

## KKP Segel yang di Bekasi .....

**Dari Halaman 1**

Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penyegehan dan penghentian pagar laut itu dilakukan karena proyek itu tidak memiliki izin (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) KKPRL. "Ini kan masih wilayah laut di situ tadi. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP karena tidak ada KKPRL," katanya. Pagar laut misterius ditemukan di Bekasi. Penemuan itu tak lama setelah pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan pagar laut di Bekasi tidak berizin. "KKP belum pernah menerbitkan izin (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) untuk pemagaran bambu yang dimaksud," katanya di Jakarta, Selasa (14/1). Doni menambahkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sudah terjun melakukan audit investigasi guna memperoleh bukti atau informasi awal (pulbaket) ke lokasi pembangunan pagar laut tersebut. Pada 19 Desember lalu, KKP juga sudah kirim surat meminta penghentian kegiatan tak berizin tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang membangun pagar itu. Namun, Doni enggan mengungkap siapa pihak yang membangun pagar laut tersebut dan bentangan panjangnya. "Sembari saat ini kami masih melakukan pendalaman. Dengan kami bersurat, artinya proses penegakan hukum sudah berjalan. Penegakan hukum itu kan ada tahapan-tahapan," katanya. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat buka suara soal pagar laut misterius di Bekasi. Mereka menyatakan pagar bambu sepanjang 2 kilometer dengan lebar area 70 meter di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, ini merupakan proyek

pemerintah. Proyek diperuntukkan bagi proyek pelabuhan perikanan. "Panjang pagar bambu ini ditargetkan akan berdiri hingga 5 kilometer di luas area kurang lebih 50 hektare," kata Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada DKP Jawa Barat Ahman Kurniawan di Bekasi, Selasa (14/1) seperti dikutip dari Antara. Ia menjelaskan proyek ini melibatkan beberapa pihak baik negeri maupun swasta. Luas area 50 hektare untuk kegiatan ini merupakan sumbangsih dua perusahaan yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN). "Jadi sebelah kiri alur ini dimiliki oleh TRPN dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT MAN," katanya. Dia memastikan pagar bambu yang terletak persis di perairan Pal Jaya itu bertujuan untuk pembangunan alur pelabuhan sebagaimana tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT TRPN. "Dalam perjanjian kerja sama itu, TRPN menyanggupi penataan kawasan pelabuhan perikanan yaitu Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Pal Jaya, Desa Segarajaya," ucapnya. Berdasarkan ketentuan kerja sama, masing-masing pihak yang terlibat melaksanakan isi perjanjian dan salah satunya adalah penataan kawasan, termasuk pembangunan alur pelabuhan PPI Paljaya ini. "Usai adanya kesepakatan tersebut, masing-masing kepentingan kemudian dapat memprosesnya. Kami dari DKP Jabar memiliki visi untuk penataan kawasan pelabuhan sementara dari pihak swasta pengembang atau investor dengan tujuan bisnis bisa berjalan berdampingan," katanya. Ahman menilai alur tersebut penting untuk memudahkan akses keluar masuk nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan guna melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan.

Kemudian pada bagian darat akan dibangun tempat pelelangan ikan (TPI) bagi nelayan secara terpusat. Kawasan utara Kabupaten Bekasi ini diproyeksikan menjadi kawasan industri perikanan. Kerja sama proyek ini sendiri direncanakan berlangsung hingga 2028 atau selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan terlibat pada Juni 2023. "Dan kami ditugaskan sebagai unit pelaksana teknis. Kami berharap pelabuhan bisa rampung sesuai masa kontrak yakni lima tahun pekerjaan," katanya. Ahman juga menyebutkan konsep pembangunan pelabuhan perikanan ini memiliki tiga fasilitas yakni fasilitas pokok terdiri atas alur pelabuhan atau akses keluar dan masuk perahu nelayan, dilengkapi dermaga, kolam labuh hingga mercusuar. Kemudian fasilitas penunjang seperti perkantoran, fasilitas umum, kamar mandi, toilet dan masjid. Terakhir fasilitas fungsional mencakup TPI, pasar ikan, pengolahan ikan, dan bongkar docking kapal ketika ada perbaikan. "Tiga fasilitas ini lah yang ada di dalam perjanjian kerja sama dengan swasta tersebut," katanya. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal daerah pemilihan (dapil) V meliputi Kecamatan Babelan, Muaragembong dan Tarumajaya Marjaya Sargan memastikan pagar laut di perairan utara Bekasi berbeda dengan di Tangerang. "Beda, Bekasi itu legal, buat Pelabuhan PPI (pangkalan pendaratan ikan), resmi itu, beda seperti di Tangerang, jadi bukan misterius," katanya. Dia menyatakan pembangunan kawasan PPI Paljaya itu merupakan kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat yang mengganggeng pihak ketiga melalui upaya pengembangan. "Tapi selengkapnya coba tanya dinas kelautan di provinsi ya, karena itu program mereka," kata dia. **(cnni/js)**

## MA Berhentikan .....

**Dari Halaman 1**

suap vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Juru Bicara MA Yanto mengatakan usulan pemberhentian sementara itu akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima surat penahanan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung). "Ketua MA menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai Hakim kepada Presiden," ujar Yanto dalam konferensi pers di Kantor MA, Jakarta, Rabu (15/1). Yanto menjelaskan MA belum mengusulkan pemecatan penuh terhadap Rudi lantaran masih harus menunggu kasusnya dinyatakan terbukti bersalah dan berstatus inkraht. Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan pimpinan MA menghormati proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Kejagung. MA, kata dia, juga mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan, fair dan akuntabel. "Pimpinan MA menekankan kepada aparaturnya pengadilannya seluruh Indonesia untuk tetap tenang bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran," katanya. Sebelumnya Kejagung resmi menetapkan mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi yang saat itu menjabat sebagai Ketua PN Surabaya disebut sempat bertemu dengan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat untuk membahas susunan Majelis Hakim kasus pembunuhan. Selain itu, Rudi juga diberi jatah suap sebesar SGD 63.000 terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Uang suap itu diterima Rudi secara terpisah dari Lisa dan dari Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. **(cnni/js)**

## Muhammadiyah Dukung..

**Dari Halaman 1**

"Oh setuju, setuju," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1). Meski begitu, Haedar mengatakan rencana kebijakan ini sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Baginya, bulan Ramadan harus dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti dan karakter para anak-anak. Ia menyoroti generasi sekarang ini lahir dari 'sistem android' yang membuat perubahan sosial yang luar biasa. "Dan mobilitas yang melahirkan anak-anak yang sebagian malah tercerabut dari budaya. Nah karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti itu menjadi sangat penting," kata dia. "Sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran," tambahnya. Gagasan libur selama bulan Ramadan awalnya dilonarkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di akhir Desember 2024 lalu. Menurut Nasaruddin, libur selama satu bulan penuh, peserta didik dapat meningkatkan berkonsentrasi mengaji, menghafal Alquran, mengamalkan amalan-amalan sosial Agama Islam, hingga berkumpul dengan keluarga. Baru-baru ini pemerintah telah membahas serius rencana ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan libur sekolah di Bulan Ramadan tahun 2025 ini akan segera diumumkan dalam Surat Edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. **(cnni/js)**



## Impor Beras Memalukan

**Dari Halaman 1**

pembangunan pertanian belum menjadi prioritas utama. Minimnya investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi, teknologi, dan distribusi hasil panen. Kurangnya insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas, seperti subsidi pupuk, benih, atau harga gabah yang layak. Impor beras dalam jumlah besar sering kali menekan harga gabah di tingkat petani, yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan petani, seperti subsidi atau insentif, hal ini bisa mengurangi minat petani dalam menanam padi di masa depan. Kebijakan impor berpotensi konflik kepentingan, seperti penunjukan perusahaan tertentu untuk impor tanpa proses transparansi. Markup harga atau pengelembungan anggaran impor yang dapat menguntungkan segelintir pihak. Ketiadaan kontrol yang efektif atas distribusi beras impor, sehingga tidak sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Peningkatan impor beras yang tidak disertai dengan upaya peningkatan produksi lokal dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung petani. Kritik terhadap kebijakan ini sering kali muncul karena masyarakat menilai ada ketimpangan antara janji pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan realitas kebijakan di lapangan. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan impor, termasuk data produksi beras, kebutuhan konsumsi, dan faktor yang memengaruhi keputusan. Meningkatkan anggaran untuk infrastruktur dan teknologi pertanian guna mendorong swasembada pangan. Memastikan kebijakan impor dilakukan secara transparan dan adil, serta diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah praktik korupsi. Pemerintah juga perlu memberikan insentif dan perlindungan harga kepada petani agar mereka tetap termotivasi untuk meningkatkan produksi. Tentu saja kita berharap, pemerintahan Prabowo, punya perhatian serius untuk membangun sektor pertanian, terutama menjadikan negeri ini kembali sebagai negara pengekspor beras, seperti semasa pemerintahan Soeharto. Sehingga para petani kembali lagi bergairah untuk menanam padi.